

Strategi & Kebijakan Pembangunan Wisata di Pantai Pengasan Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Strategy & Policy Of Tourism Development in Pengasan Beach, Kalipelus Village, Kebonagung Sub-District, Pacitan District

Guszali Setiyoko¹, Irvan Nur Ridho², Dian Suluh Kusuma
Dewi³, Yusuf Adam Hilman^{4*}

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Info Artikel

Diterima : 10 Juni 2025
Direvisi : 26 September 2025
Disetujui : 25 Maret 2026

Kata kunci:

Kebijakan
Desa
Wisata;

Keywords:

Policy
Village
Tourism;

Corresponding Author:

Yusuf Adam Hilman
Adam_hilman@umpo.ac.id

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan pengembangan wisata Desa Kalipelus di Pantai Pangasan berjalan. Penelitian ini berupaya mengkaji pengelolaan pariwisata berkelanjutan melalui strategi kolaborasi pemerintah. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan sumber data primer diolah dari beberapa informan dengan metode *purposive*, yaitu: kepala desa, pokdarwis, bumdes, tokoh masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran strategis pemerintahan desa dalam merancang kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur guna mendukung sektor pariwisata. Pengelolaan operasional dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan dukungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memastikan transparansi dan keberlanjutan. Aktivitas pariwisata yang dilakukan di desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha mikro, sehingga menciptakan ekosistem wisata yang mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi.

Summary

This research aims to see how far the tourism development policy of Kalipelus Village at Pangasan Beach goes, this research seeks to examine sustainable tourism management through government collaboration strategies. This research is qualitative with primary data sources processed from several informants with purposive method, namely: village head, POKDARWIS, BUMDes, community leaders. The results showed that the village government plays a strategic role in designing policies and allocating budgets for infrastructure to support the tourism sector. Operational management is carried out by the Tourism Awareness Group (POKDARWIS) with the support of the Village-Owned Enterprise (BUMDes), which ensures transparency and sustainability. Tourism activities conducted in the village have increased community income through micro-enterprises, thus creating a tourism ecosystem that supports socio-economic growth.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa wisata yang muncul dan tumbuh subur pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ternyata telah menjadi *trend* di lingkungan pemerintah desa sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, hal ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian, dengan membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan berbagai kesempatan wirausaha bagi masyarakat desa, dampaknya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Fakta memperlihatkan bahwa terdapat sebanyak 6.108 desa wisata terbentuk, dimana tersebar di seluruh Provinsi dari sabang sampai Merauke. Desa wisata terbanyak di Indonesia, berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah desa wisata sebanyak 616 yang tersebar di 31 Kabupaten / Kota. Persebaran desa wisata bisa dilihat secara seksama dari gambar 1 dan juga tabel 1, yang secara spesifik memperlihatkan persebarannya



Gambar 1 Pesebaran Desa Wisata di Provinsi Jawa Timur

Sumber: <https://jadesta.kememparekraf.go.id/sebaran>

Tabel 1 Distribusi desa wisata Jawa timur

| Kabupaten /Kota | Jumlah |
|-----------------------|------------|
| Kabupaten Ngawi | 7 |
| Kota Batu | 24 |
| Kabupaten Sampang | 11 |
| Kabupaten Malang | 48 |
| Kabupaten Trenggalek | 36 |
| Kabupaten Jember | 49 |
| Kabupaten Pasuruan | 15 |
| Kabupaten Lamongan | 22 |
| Kabupaten Banyuwangi | 61 |
| Kabupaten Bondowoso | 7 |
| Kabupaten Blitar | 37 |
| Kabupaten Ponorogo | 38 |
| Kabupaten Jombang | 14 |
| Kabupaten Situbondo | 6 |
| Kabupaten Probolinggo | 16 |
| Kabupaten Pamekasan | 3 |
| Kabupaten Sidoarjo | 7 |
| Kabupaten Gresik | 31 |
| Kabupaten Mojokerto | 22 |
| Kota Surabaya | 13 |
| Kabupaten Madiun | 14 |
| Kabupaten Pacitan | 7 |
| Kabupaten Tulungagung | 8 |
| Kabupaten Tuban | 10 |
| Kabupaten Magetan | 28 |
| Kabupaten Kediri | 21 |
| Kabupaten Bojonegoro | 12 |
| Kabupaten Nganjuk | 4 |
| Kabupaten Sumenep | 8 |
| Kota Malang | 6 |
| Kota Mojokerto | 15 |
| Kota Blitar | 2 |
| Kota Kediri | 3 |
| Kabupaten Lumajang | 10 |
| Kabupaten Bangkalan | 1 |
| Total | 616 |

Sumber: <https://jadesta.kememparekraf.go.id/sebaran>

Keberadaan desa wisata yang terus bertumbuh merupakan realitas yang tidak bisa dibendung, walaupun nampak bertumbuh besar secara kuantitas, namun persoalan tata

kelola destinasi wisata menjadi pekerjaan rumah bersama, terlihat dari masih banyaknya objek wisata yang memiliki kekurangan, tidak berkelanjutan, atau hanya sekedar *repetisi* serta *duplikasi* dari tempat lain tanpa perhitungan yang matang dan juga perencanaan yang baik, bahkan masih ada objek wisata yang dikelola ala kadarnya.

Hasil riset terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan desa wisata tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu: 1). Adanya inovasi masyarakat terkait pengembangan obyek wisata, pelibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif, bantuan finansial, serta dukungan dari berbagai *stakeholder* (Putri & Manaf, 2013). 2). Partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung menjadi kunci penting terkait keberhasilan pengembangan desa wisata (Purbasari et al., 2014). 3). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: tenaga, uang, dan harta benda (Nurwanda et al., 2021). 4). Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan desa wisata dalam membangun destinasi yang ada (Martina Herliana et al., 2021). 5). Digitalisasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan destinasi wisata (Maulia & Setiyono, 2023). 6). Modal sosial menjadi faktor penentu keberhasilan desa wisata, meliputi: kepercayaan jaringan sosial, dan norma

(Utami, 2020). 7). Kolaborasi menjadi salah satu penopang keberhasilan dalam mendukung efektifitas desa wisata (Utami, 2020). 8). Potensi desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan penyelenggaraan desa wisata (Kaetschi, 2014).

Melihat faktor keberhasilan desa wisata, kami merasa tertarik untuk melihat sejauh mana pengelolaan obyek wisata Pantai Pengasan Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup berhasil.

Pengembangan dan pembangunan destinasi wisata ini telah direncanakan melalui peraturan Desa Kalipelus No.3 Tahun 2020. Pemerintah Desa Kalipelus juga mendirikan usaha-usaha baru untuk memfasilitasi, melayani, dan memberikan bantuan bagi anggota maupun masyarakat Desa Kalipelus untuk membuka usaha yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa. Salah satu perubahan signifikan adalah perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata. Jalan yang sebelumnya rusak dan penuh bebatuan kini sebagian besar telah diaspal, sehingga mempermudah akses wisatawan yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, fasilitas pendukung seperti area parkir untuk mobil dan motor juga telah disediakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Program pengembangan destinasi wisata Pantai Pangasan di Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, juga terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Desa Kalipelus yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalipelus. RPJMDes ini mencakup aspirasi masyarakat terkait berbagai layanan publik yang kemudian dikaji dan dianalisis sebelum dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan RKPDDes membutuhkan waktu satu tahun sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendapatan desa diawasi melalui APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), di mana kepala desa bertanggung jawab mengelola anggaran desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan anggaran untuk program pengembangan wisata Pantai Pangasan, dibuat proposal yang diajukan kepada BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Daerah).

Pada tahun 2023 dana tersebut digunakan untuk mengembangkan wisata yang ada di Desa Kalipelus yaitu Pantai Pangasan, pihak TNI juga terlibat dalam pembangunan akses jalan menuju tujuan wisata tersebut.

Kemudahan akses menuju lokasi wisata menjadi salah satu faktor penting yang menambah nilai strategis, selain potensi alam yang sudah dimiliki oleh desa wisata tersebut.

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari peran aktif lembaga atau institusi lokal yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Pemerintah Desa Kalipelus memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi wisatanya melalui berbagai strategi, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi pariwisata berkelanjutan. Upaya peningkatan infrastruktur meliputi perbaikan akses jalan, pembangunan fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat, serta penyediaan area parkir yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Peningkatan penjenamaan Desa Wisata Kalipelus juga diperhatikan melalui melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan dinamis antar pihak yang terlibat.

Keberhasilan Desa Kalipelus juga terlihat dari meningkatnya pengakuan di tingkat nasional. Penghargaan nominasi Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 menjadi simbol transformasi desa yang sebelumnya terpencil menjadi salah satu desa wisata terbaik di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait, potensi desa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Realitas yang digambarkan secara detail terkait kondisi Pantai Pangasan yang telah berhasil dikembangkan, menjadi sebuah kajian menarik, tentang pengembangan tata kelola kebijakan wisata di Desa Kalipelus.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan penyajian data primer dan sekunder, data yang dikumpulkan kemudian dikodifikasi, dan disajikan setelah itu dianalisis (Utami, 2020).

Data primer berupa hasil wawancara dari beberapa informan yang sudah ditentukan melalui *purposive sampling*, antara lain: pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Menurut Creswell (2022), studi kasus melibatkan pengumpulan data secara menyeluruh karena peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, analisis yang tepat sangat diperlukan untuk menyusun gambaran yang rinci mengenai kasus yang ditemukan (Nurdin & Pettalongi, 2022) (Rd. Nia Kania Kurniawati et al., 2022) (Hisyam et al., n.d.).

Alur dari proses penelitian, dapat dilihat dari gambar 2, yang memperlihatkan mekanisme dalam pelaksanaan penelitian, selain itu terdapat beberapa tahapan untuk uji keabsahan data, melalui model triangulasi

yang dalam penelitian ini berupa triangulasi sumber.



Gambar 2. Alur Penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Wisata Desa

Tujuan Kebijakan

Pengelolaan pariwisata di Kalipelus memiliki tujuan utama untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan desa guna memastikan keberlanjutan sektor pariwisata. Selain itu, terdapat dua fokus tujuan yang teridentifikasi, yaitu: 1). peningkatan perekonomian desa dalam jangka pendek, 2). pengembangan desa secara menyeluruh melalui sektor pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang. Upaya konkret yang dilakukan meliputi perbaikan sarana dan prasarana menuju lokasi wisata serta penguatan peran Pokdarwis dan BUMDes dalam pengelolaan pariwisata (Pokdarwis, 2023).

Informasi yang telah diperoleh menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung sektor pariwisata di Kalipelus. Pokdarwis memiliki peran utama dalam menjaga keberlanjutan wisata dengan memastikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan destinasi wisata, khususnya Pantai Pangasan. Sementara itu, BUMDes bertindak sebagai lembaga yang mengelola sektor pariwisata secara lebih

terstruktur, termasuk dalam perbaikan infrastruktur dan pengelolaan unit usaha terkait pariwisata.

Pemerintah desa juga berperan dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program *corporate social responsibility* (CSR), untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Keberhasilan pengelolaan pariwisata di Kalipelus bergantung pada kerja sama yang sinergis antara pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, serta pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan sektor swasta. Perbaikan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam meningkatkan jumlah wisatawan, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya strategi ini, diharapkan pariwisata di Kalipelus tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi sektor yang berkelanjutan untuk mendukung perkembangan desa secara keseluruhan.

Sumber Daya

Pengelolaan dana untuk pengembangan pariwisata di Desa Kalipelus sangat bergantung pada anggaran yang dialokasikan dari dana pusat dan pemerintah daerah. Namun, jumlah dana yang diterima tidak selalu tetap setiap tahunnya, sehingga

terdapat fluktuasi dalam besaran dana yang dialokasikan untuk sektor pariwisata.

Dalam pengelolaan Pantai Pangasan, Pokdarwis memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di berbagai bidang seperti pembangunan, pendidikan, dan pemasaran. Keahlian ini menjadi aset utama dalam mengelola destinasi wisata agar terus berkembang. Selain itu, dukungan pelatihan dari Dinas Pariwisata dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah turut berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur wisata sebagian besar berasal dari Pemerintah Desa dan Kabupaten, menunjukkan adanya kolaborasi antarpihak untuk memastikan keberlanjutan serta peningkatan kualitas destinasi wisata di Kalipelus (Bumdes, 2023).

Pemerintah Desa Kalipelus memiliki harapan besar agar desa dapat mencapai kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan pendapatan. Salah satu langkah yang diharapkan adalah peningkatan pendapatan desa dari sektor pariwisata sehingga desa tidak lagi bergantung pada anggaran eksternal. Jika pendapatan dari sektor wisata terus meningkat, maka kontribusi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin besar. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

Masyarakat juga memiliki peran dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Mereka dapat menyampaikan aspirasi melalui DPRD,

pemerintah desa, atau Dinas Lingkungan Hidup, yang kemudian akan menampung dan merangkum usulan-usulan tersebut untuk penyempurnaan peraturan daerah. Adanya saluran resmi bagi partisipasi publik ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan lingkungan.

Pengembangan sektor pariwisata di Desa Kalipelus melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, Pokdarwis, BUMDes, serta pengelola wisata. Salah satu strategi yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana guna memperbaiki aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Pantai Pangasan merupakan daya tarik utama yang telah dikembangkan, tetapi masih terdapat potensi wisata lain yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pokdarwis, BUMDes, Pemerintah Desa, dan masyarakat diharapkan dapat menggali serta mengembangkan potensi wisata lainnya agar memberikan manfaat yang lebih luas. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Sinergi antarpihak menjadi faktor utama dalam merancang strategi pengembangan sektor pariwisata yang

berkelanjutan serta bermanfaat bagi desa dan warganya.

Karakteristik Organisasi

Sikap pemerintah desa dalam mendukung pengembangan pariwisata di Desa Kalipelus tercermin dalam kebijakan yang konsisten dalam mengalokasikan anggaran setiap tahunnya. Pemerintah desa secara rutin menyediakan dana untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata dengan tujuan meningkatkan aspek-aspek penting, seperti keindahan alam dan fasilitas pendukung objek wisata. Komitmen ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas sektor pariwisata agar dapat menarik lebih banyak wisatawan. Keberadaan kebijakan yang mendukung pengelolaan pariwisata diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakatnya (Pemdes, 2023).

Pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Kalipelus dilakukan melalui prinsip kolaborasi dan koordinasi yang erat antarpihak, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pengelola wisata, dan masyarakat lokal. Semua pihak terlibat secara aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan potensi wisata alam desa agar dapat mencapai daya saing di tingkat nasional. Keberhasilan sektor pariwisata tidak dapat dicapai secara terpisah, sehingga kerja sama menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata. Upaya untuk memperkuat hubungan kerja antar pihak terus dilakukan guna meningkatkan

sinergi dalam setiap langkah pengembangan destinasi wisata di Kalipelus.

Peran Pokdarwis dan BUMDes dalam pengelolaan wisata memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Pokdarwis bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional wisata Pantai Pangasan dan memastikan kelancaran pengelolaan di lapangan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pengelolaan wisata secara optimal. Di sisi lain, BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai unit usaha, termasuk sektor pariwisata. Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, BUMDes tetap berperan dalam pengawasan dan pemberian dukungan terhadap pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pengelola lokal. Dengan demikian, kedua lembaga ini berkolaborasi untuk memastikan bahwa pengelolaan sektor pariwisata berjalan secara efektif, terarah, serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi desa dan masyarakatnya.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Pelaksanaan Kegiatan

Kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan sektor pariwisata di Desa Kalipelus menunjukkan adanya pola kerja sama yang sistematis dan terstruktur. Keterlibatan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, Dinas Pariwisata, serta masyarakat lokal mencerminkan adanya sinergi yang kuat dalam mendukung pengembangan potensi wisata, seperti Pantai Pangasan. Pemerintah desa berperan dalam perencanaan dan alokasi

anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang keberlanjutan pariwisata. Sementara itu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki tanggung jawab dalam operasional lapangan serta berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah untuk memberikan laporan mengenai jumlah kunjungan wisatawan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga berperan strategis dalam pengelolaan sektor wisata, terutama dalam memastikan keberlanjutan usaha wisata melalui dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak (Pemdes, 2023).

Pengelolaan wisata di Pantai Pangasan dijalankan melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Pokdarwis sebagai pengelola utama bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional, mulai dari pengelolaan fasilitas hingga pelayanan wisatawan. Setiap bulan, Pokdarwis menyusun laporan yang mencakup data jumlah pengunjung, pendapatan yang diperoleh, serta berbagai aktivitas wisata lainnya. Laporan ini kemudian diteruskan kepada BUMDes untuk diverifikasi sebelum disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Proses ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang diterapkan tidak hanya berfungsi untuk memantau perkembangan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pengelolaan wisata di masa mendatang.

Pemerintah desa menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan

tidak hanya berupaya mempertahankan potensi yang ada, tetapi juga secara aktif melakukan inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Langkah-langkah strategis yang diambil, seperti penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta pelatihan bagi masyarakat, menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan peningkatan fasilitas, upaya yang dilakukan terus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata juga semakin meningkat. Kesadaran akan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari industri pariwisata mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam berbagai aspek, seperti perbaikan infrastruktur dan pengembangan usaha kecil. Banyak warga yang mulai mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti warung makan dan jasa lainnya, guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan usaha desa, BUMDes menunjukkan komitmen dalam mendukung sektor

pariwisata dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Peran BUMDes tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah desa. Kerja sama yang terjalin antara BUMDes, pemerintah, dan masyarakat menciptakan pondasi yang kuat untuk pengelolaan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata semakin berkembang, ditandai dengan meningkatnya jumlah warga yang membuka usaha di sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisatawan memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, baik melalui pertumbuhan UMKM maupun peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan semakin berkembangnya sektor ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terus meningkat, sekaligus menciptakan model pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak di Desa Kalipelus menjadi faktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan sektor

pariwisata, khususnya di Pantai Pangasan. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, Dinas Pariwisata, serta masyarakat lokal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan sektor ini. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penganggaran dan perbaikan sarana prasarana, sedangkan Pokdarwis berperan dalam pengelolaan operasional sehari-hari serta penyampaian laporan perkembangan wisata kepada pemerintah. Di sisi lain, BUMDes turut berperan dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan wisata melalui analisis serta verifikasi data yang dikumpulkan dari Pokdarwis sebelum diteruskan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari evaluasi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemerintah desa menunjukkan komitmen tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan berbagai upaya inovasi guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan perbaikan fasilitas, pemerintah desa tetap berusaha menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik, tetapi juga memperhatikan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka dapat lebih siap dalam mengelola sektor pariwisata secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Pemdes, 2023).

Kesadaran dan motivasi masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata semakin

meningkat. Banyak warga yang mulai membuka usaha kecil seperti warung dan UMKM guna memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata mencerminkan sinergi positif antara peluang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perbaikan infrastruktur dan pelayanan wisata menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

BUMDes berperan sebagai lembaga yang memastikan kelancaran operasional wisata serta membangun hubungan koordinatif dengan berbagai pihak. Melalui pengelolaan sumber daya dan fasilitas yang optimal, BUMDes berusaha menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi landasan utama dalam menciptakan pengelolaan wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi yang baik, sektor pariwisata di Desa Kalipelus diharapkan dapat berkembang secara optimal serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata, dampak positif terhadap perekonomian desa semakin terlihat. Kehadiran wisatawan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai usaha yang berkembang di sekitar

destinasi wisata. Selain membuka peluang lapangan kerja, sektor ini juga menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat desa. Dukungan berbagai pihak serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan sektor pariwisata di Desa Kalipelus.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Perkembangan sektor pariwisata di sekitar Pantai Pangasan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Data yang disajikan mengindikasikan adanya peningkatan jumlah usaha yang berkaitan dengan pariwisata, seperti warung makan, kios souvenir, dan toko yang menjual produk lokal khas desa. Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Pertumbuhan jumlah warung yang kini mencapai lebih dari tujuh unit di sepanjang jalan menuju pantai mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perkembangan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mengubah pola sosial masyarakat. Jika sebelumnya sebagian besar warga belum menyadari potensi ekonomi di sekitar mereka, kini semakin banyak individu yang memanfaatkan peluang usaha kecil di bidang kuliner, penjualan oleh-oleh, dan produk lokal lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap peluang ekonomi yang ditawarkan oleh sektor pariwisata. Kesadaran ini mendorong munculnya kreativitas dan keberanian dalam mengelola usaha, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dampak sosial yang dihasilkan dari perkembangan sektor pariwisata juga terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap peluang bisnis dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dengan semakin banyaknya usaha yang beroperasi, terbuka kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi berbasis pariwisata juga menunjukkan adanya perubahan struktural yang lebih luas, di mana pariwisata tidak hanya menjadi

sumber pendapatan tambahan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membentuk kemandirian ekonomi desa (Bumdes, 2023).

Transformasi sosial-ekonomi yang terjadi di Pantai Pangasan mencerminkan hubungan erat antara pertumbuhan sektor pariwisata dengan perubahan pola kehidupan masyarakat. Selain berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, pariwisata juga menjadi pendorong utama dalam membentuk masyarakat yang lebih inovatif dan berdaya saing. Dengan demikian, sektor pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa secara berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Kalipelus, khususnya di sekitar Pantai Pangasan, yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah desa memainkan peran utama dalam perencanaan ini dengan melakukan evaluasi tahunan terhadap infrastruktur dan fasilitas yang perlu ditingkatkan. Alokasi anggaran yang cukup besar, mencapai Rp500 juta dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan keseriusan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur serta pembangunan fasilitas yang bertujuan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat daya tarik destinasi. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dasar seperti jalan dan rabat beton, tetapi juga mencakup fasilitas pendukung lainnya seperti gasibu, musala, dan MCK. Keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) turut berperan dalam perencanaan jangka panjang pengembangan fasilitas, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) turut

berkontribusi sebagai mitra dalam usulan dan kolaborasi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Meski tidak secara langsung membangun fasilitas, BUMDES berperan dalam mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dianggap esensial bagi wisatawan (Pemdes, 2023).

Pembangunan akses jalan menuju Pantai Pangasan menjadi salah satu perhatian utama karena aksesibilitas yang baik merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Meskipun pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk pembangunan infrastruktur ini, tantangan masih tetap ada, terutama dalam pelebaran jalan untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan wisatawan. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, kebutuhan akan akses jalan yang lebih luas menjadi semakin mendesak. Selain aspek infrastruktur, pengelola wisata di Desa Kalipelus memiliki harapan terkait pengembangan sektor pariwisata, terutama dalam penambahan wahana dengan tetap mempertahankan konsep alami Pantai Pangasan. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata ini agar setara dengan destinasi wisata terkenal lainnya. Namun, dalam pengelolaannya, ditekankan bahwa potensi wisata yang ada merupakan keindahan alam yang telah tersedia, bukan hasil buatan manusia. Oleh karena itu, strategi promosi dan pengelolaan dilakukan dengan pendekatan

yang menonjolkan keunikan dan keaslian alam yang dimiliki. Secara keseluruhan, upaya pengembangan sektor pariwisata di Desa Kalipelus tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan strategi perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal yang telah ada.

Proses dan tahapan dalam pengembangan kawasan wisata, dituangkan ke dalam Tabel 1 mengenai peran kelembagaan dalam pembentukan desa wisata.

Peranan masing-masing lembaga, meliputi: proses perencanaan, proses pembentukan lembaga seperti BUMDes dan Pokdarwis. Proses penyusunan peraturan desa, proses pengoperasian obyek wisata, proses evaluasi obyek wisata didalamnya melakukan analisis keuntungan, kerugian, aspek manfaat bagi lingkungan, sehingga muncul rekomendasi untuk perbaikan kedepannya, sehingga bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tabel 2 Peran lembaga dalam pengembangan wisata

| Lembaga | Peran |
|----------------|---|
| Kepala Desa | Mempersiapkan payung hukum berupa perdes untuk pengembangan desa wisata di kalipelus, mempersiapkan SDM yang akan membantu pelaksanaan jalanya obyek wisata, mempersiapkan pendanaan untuk operasional obyek wisata |
| Pokdarwis | Bertugas untuk membantu produksi kegiatan wisata pada obyek wisata, sebagai pelaksana teknis dilapangan. |
| BUMDes | Bertugas sebagai manajemen operasional dan keuangan dari obyek wisata, yang mengatur segala kebutuhan obyek wisata, pembiayaan, penggajian, dan juga menata pemasukan dari obyek wisata |

Sumber: diolah dari hasil penelitian

KESIMPULAN

Sinergitas yang kuat antara masyarakat, pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, dan organisasi terkait berhasil menciptakan sistem pariwisata yang berkelanjutan. Melalui alokasi anggaran rutin untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, desa ini mampu memanfaatkan potensi wisata alamnya, seperti Pantai Pangasan, untuk menarik wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Pemerintah desa memegang peran sentral dalam kebijakan strategis, sedangkan Pokdarwis bertindak sebagai pelaksana

operasional di lapangan, memastikan bahwa kebersihan, kenyamanan, dan keamanan wisatawan tetap terjaga. Di sisi lain, BUMDes berperan dalam pengelolaan strategis dan transparansi keuangan, dengan mendukung pengusulan perbaikan infrastruktur dan melaporkan pendapatan kepada pemerintah desa untuk evaluasi.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan pariwisata memberikan dampak positif yang signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, masyarakat menjadi lebih sadar akan peluang usaha yang ditawarkan sektor pariwisata, sehingga banyak yang membuka usaha kecil seperti warung dan kios. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara sosial, terdapat transformasi pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap peluang ekonomi dan semakin termotivasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wisata. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, musala, dan MCK, menjadi salah satu prioritas utama. Meski terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat memungkinkan pengembangan tetap berjalan dengan baik. Komitmen desa untuk memanfaatkan potensi wisata secara optimal, disertai investasi yang

signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi landasan kuat untuk mendukung pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan.

Manajemen atau tata kelola pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kualitas hidup yang lebih baik. Desa Kalipelus menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal yang dikelola secara serius dapat menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas yang ada di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bumdes. (2023). *Bumdes*.

Hisyam, R. Z., Nur, T., & Noviar, A. (n.d.). *Komunikasi Door-to-Door sebagai Upaya Pengembangan Program One Pesantren One Product*.

Kaetshi, E. W. (2014). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Wisata Karangbanjar Kabupaten Purbalingga. *Solidarity: Journal Unnes*, 3(1), 56–61.

Martina Herliana, Lala M Kolopaking, & Lukman Hakim. (2021). Gaya Kepemimpinan Ketua Kelompok Sadar Wisata Dan Keberhasilan Desa Wisata. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(4), 547–562. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i4.862>

Maulia, E. I., & Setiyono, B. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 31(1), 404–418.

Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Menggunakan Paradigma Studi Kasus Kualitatif Interpretatif Online dan Offline Untuk Memahami Efektivitas Penerapan E-Procurement. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 155–168. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.1518>

Nurwanda, M. I., Setiyono, B., & Wijayanto. (2021). Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 1–21.

Pemdes. (2023). *Pemerintah Desa*.

Pokdarwis. (2023). *Kelompok Sadar Wisata*.

Purbasari, N., Asnawi, D., Jurusan, M., Wilayah, P., & Kota, D. (2014). 476 Keberhasilan Community Based Tourism Di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari Dan Nglanggeran Keyword : PNPM Mandiri Pariwisata (National Community Empowerment Program of Tourism in Indonesia), community based tourism, model. *Jurnal Teknik PWK*, 3(3), 476–485.

Putri, H. P. J., & Manaf, A. (2013). Faktor-faktor keberhasilan pengembangan desa wisata di dataran tinggi Dieng.

Teknik Perencanaan Wilayah Kota,
2(3), 559–568.

Rd. Nia Kania Kurniawati, Ail Muldi, Yoki Susanto, & Neka Fitriyah. (2022). Model Manajemen Krisis Public Relations (MPR) dalam Menghadapi Krisis di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(April 2020), 483–444.

Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44.

<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>